

HUBUNGAN ANTARA KEKETATAN RESPONS KEBIJAKAN PEMERINTAH DENGAN TREN KASUS KONFIRMASI COVID-19 DI INDONESIA

Meyga Renya Hode¹, Grace D. Kandou², Eva M. Mantjoro³

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sam Ratulangi Manado^{1,2,3}
meyga.ho@gmail.com¹, grace.kandou@unsrat.ac.id²

ABSTRACT

One of the diseases that is still priority of the world is COVID-19. The disease called pandemic since 2020 by WHO has developed to several new variants are found until November 2021 such as alpha, beta to delta variants. There is no indication for the end of this pandemic, so planning is needed until a response from the government is needed. The government's policy response has contributing to overcoming the pandemic of COVID-19. The Indonesian state, especially its government, is included in one of the countries with governments that have responded to the pandemic and issued various regulations and policies, but still experienced 2x the spike in cases until reports of public non-compliance with one of the health protocols were found. Based on this, it shows the leeway of various policies and regulations issued by the Indonesian government. This study plans to analyze new cases of confirmation with the stringency index of the government's policy response to COVID-19 cases in Indonesia. This research using observational analytical methods and cross sectional approaches has data sources originating from the ourworldindata.org website with a location in Indonesia for the period 2 March 2020 - 28 February 2022. Analysis with value $\alpha = 0.05$ using the spearman correlation test as a bivariate analysis test. The outcome of the study reveal p - value 0.000 and value r of 0.369. The conclusion is that there is a connection between the stringency of the government's policy response to COVID-19 and confirmed cases of COVID-19 in Indonesia.

Keywords : Confirmation Case, COVID-19, Policy Response Stringency

ABSTRAK

Salah satu penyakit yang masih menjadi prioritas dunia adalah COVID-19. Penyakit yang disebut pandemi sejak tahun 2020 oleh WHO telah berkembang hingga ditemukan beberapa varian baru sampai November 2021 seperti varian alpha, beta hingga delta. Belum terdapat tanda-tanda berakhirnya pandemi ini maka dibutuhkan perencanaan hingga respons dari pemerintah. Respons kebijakan pemerintah turut andil dalam mengatasi pandemi COVID-19. Negara Indonesia khususnya pemerintahannya termasuk dalam salah satu negara dengan pemerintahan yang telah merespons pandemi tersebut dan mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan, tetapi masih mengalami 2x lonjakan kasus hingga ditemukan laporan adanya ketidakpatuhan masyarakat terhadap salah satu protokol kesehatan. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan adanya kelonggaran penerapan dari berbagai kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus baru konfirmasi dengan keketatan respons kebijakan pemerintah terhadap COVID-19 di Indonesia. Riset dengan metode analitik observasional serta pendekatan *cross sectional* ini memiliki sumber data yang berasal dari website ourworldindata.org dengan lokasi Indonesia periode 2 Maret 2020 – 28 Februari 2022. Uji korelasi spearman sebagai uji analisis bivariat dengan nilai $\alpha = 0,05$. Hasil penelitian menunjukkan p – value 0,000 serta nilai r sebesar 0,369. Kesimpulannya adalah terdapat korelasi antara keketatan respons kebijakan pemerintah terhadap COVID-19 dengan kasus baru konfirmasi COVID-19 di Indonesia.

Kata Kunci : COVID-19, Kasus Konfirmasi, Ketetapan Respons Kebijakan

PENDAHULUAN

Salah satu penyakit yang masih menjadi prioritas dunia adalah COVID-19.

Penyakit ini hadir sejak akhir tahun 2019 kemudian dikemukakan World Health Organization (WHO) sebagai pandemi di

tahun 2020. Beberapa varian baru SARS-CoV-2 telah muncul di Indonesia hingga Mei tahun 2021 seperti varian alpha, beta hingga delta (Rokom, 2021b). Saat ini, COVID-19 belum menunjukkan indikasi bahwa penyakit tersebut akan berakhir atau menurunkan status pandemi penyakit itu. Oleh sebab itu, menangani pandemi ini membutuhkan perencanaan, tanggapan dan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk respons kebijakan pemerintah.

Respons kebijakan pemerintah turut andil dalam mengatasi pandemi COVID-19. Penelitian Telles, dkk. (2021) merupakan penelitian dengan pendekatan eksperimental pada lebih dari 20 negara guna mengidentifikasi perbedaan hasil dari langkah-langkah kebijakan *social distancing*. Hasil penelitian tersebut yaitu penerapan kebijakan dapat memengaruhi penyebaran COVID-19 terutama pada Negara China dan Korea Selatan saat awal epidemi yaitu dengan penggunaan masker, menjaga jarak dan desinfeksi kota. Penelitian model regresi linier oleh Ogundokun, dkk. (2020) di Nigeria juga menunjukkan riwayat perjalanan (p -value $<0,00001$) serta kontak (p -value $<0,0001$) meningkatkan risiko terinfeksi COVID-19 sebesar 85% dan 88% sehingga usaha memberlakukan aturan pembatasan perjalanan merupakan keputusan yang tepat dalam mencegah bertambahnya kasus COVID-19.

Memberikan respons terkait pandemi ini, Indonesia sebagai salah satu negara dengan pemerintahan yang telah mengeluarkan beberapa peraturan serta kebijakan. Beberapa peraturan dan kebijakan yang dimaksud yaitu pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di masyarakat yang salah satunya meliputi pembatasan kegiatan liburan sekolah, tempat kerja dan keagamaan (Kemlu, 2020). Serta pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang mengatur tentang *work from home* dan *work from office*, pembatasan makan/minum, kegiatan belajar mengajar, pelaksanaan keagamaan serta jam

operasional hingga pemerintah mengeluarkan regulasi yang mengatur perjalanan masyarakat (Menteri Dalam Negeri, 2021). Semua kebijakan dan aturan yang telah dikeluarkan bertujuan untuk mengurangi angka konfirmasi COVID-19.

Kasus COVID-19 di seluruh negara cenderung meningkat. Total kasus konfirmasi hingga tanggal 17 Februari 2022 di dunia mencapai 417.767.644 kasus dan 5.850.757 kasus kematian. Total kasus pada tanggal yang sama, Indonesia memiliki 4.966.046 total kasus konfirmasi dan 145.622 kematian (JHU CSSE COVID-19 Data, 2022). Selama tahun 2020 – 2021, Indonesia mengalami dua kali kenaikan kasus secara signifikan COVID-19. Salah satunya terjadi di Kudus, Jawa Tengah dikarenakan hubungan sosial yang padat, kendornya protokol kesehatan pada libur Idul Fitri juga ditemukan sebanyak 82% adanya transmisi varian delta antarmanusia (Rokom, 2021a). Selain itu, telah diumumkan varian varian baru yaitu omicron di Afrika Selatan pada 26 November 2021 (WHO, 2021).

Kemunculan varian baru dari COVID-19 secara terus-menerus, longgarnya penerapan protokol kesehatan dan adanya peningkatan kasus menunjukkan longgarnya penerapan dari berbagai kebijakan dan peraturan yang telah dikeluarkan sehingga perlunya keketatan hingga evaluasi terhadap upaya dan kebijakan dari pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis kasus baru konfirmasi dengan keketatan respons kebijakan pemerintah terhadap COVID-19 di Indonesia.

METODE

Riset dengan metode analitik observasional serta pendekatan *cross sectional* ini datanya diakses melalui website ourworldindata.org. Penelitian dengan uji korelasi spearman rho sebagai

analisis bivariat ini berlokasi di Indonesia. Sampel yaitu kasus baru konfirmasi COVID-19 (variabel terikat) dan angka keketatan respons kebijakan pemerintah terhadap COVID-19 (variabel bebas) dari tanggal 2 Maret 2020 – 28 Februari 2022 sehingga N = 729.

HASIL

Analisis Univariat



Gambar 1. Distribusi Kasus Baru Konfirmasi COVID-19 berdasarkan Tanggal

Hasil analisis pada gambar 1 menunjukkan adanya lonjakan kasus yang signifikan sebanyak tiga kali. Peningkatan kasus COVID-19 secara signifikan terjadi pertama kali sejak ditemukannya kasus di Indonesia yang kemudian berkembang hingga berpuncak pada bulan Januari, tepatnya tanggal 31 Januari 2021 dengan 14.518 kasus. Peningkatan kasus atau sering disebut gelombang dua kasus COVID-19 terjadi sejak pertengahan bulan Mei hingga puncaknya pada 15 Juli 2021 dengan 56.767 kasus. Gelombang ketiga terjadi sejak awal bulan Januari 2022 hingga puncak kasusnya pada 16 Februari 2022 sebanyak 64.718 kasus konfirmasi COVID-19.

Penilaian variabel ini dinilai oleh *Oxford COVID-19 Government Response Tracker* (OxCGRT). Gambar 2 yaitu grafik keketatan respons kebijakan pemerintah memperlihatkan angka yang terus meningkat sejak awal epidemi di Indonesia hingga puncaknya pada 24 April – 5 Mei 2020 (nilai 80,09). Grafik

penurunan angka secara signifikan terjadi pada bulan Oktober 2020 dari nilai 72,69 menurun 22,23 angka menjadi 50,46. Penilaian stabil juga tercatat sejak 1 Maret – 19 September 2021 dengan nilai 71,76. Penilaian tersebut berdasarkan sembilan indikator yaitu penutupan sekolah, pembatasan pertemuan publik, kontrol perjalanan internasional, penutupan angkutan umum, penutupan tempat kerja, persyaratan tinggal di rumah, kampanye informasi publik, pembatalan acara publik dan pembatasan gerakan internal (BSG University of Oxford, 2021).



Gambar 2. Distribusi Keketatan Respons Kebijakan Pemerintah terhadap COVID-19 berdasarkan Tanggal

Analisis Bivariat

Tabel 1. Distribusi Variabel berdasarkan Hasil Analisis Korelasi Spearman

Variabel	n	r	p-value
Keketatan Respons Pemerintah terhadap COVID-19	729	0,369	0,000
Kasus baru konfirmasi COVID-19	729	0,369	0,000

Hasil tersebut memperlihatkan adanya korelasi ($p\text{-value} = 0,000$) antara keketatan respons kebijakan pemerintah dengan kasus konfirmasi COVID-19 di Indonesia dengan nilai r (korelasi) 0,369. Berdasarkan hasil uji korelasi spearman rho tersebut, disimpulkan hipotesis (H_0) pada penelitian ini diterima.

PEMBAHASAN

Kasus Baru Konfirmasi COVID-19

COVID-19 merupakan penyakit yang penyebarannya relatif cepat. Awal penyebaran diketahui berasal dari partisipan dalam acara di Jakarta hingga adanya laporan dari masyarakat Indonesia yang melakukan perjalanan internasional. Angka kasus yang terus bertambah juga dikarenakan telah ditemukan laporan empat klaster besar di Provinsi Jawa Barat. Laporan kasus yang terjadi berkembang menjadi *super spreader* yang menyebar hingga ke daerah lain di Indonesia (Vermonte dan Wicaksono, 2020). Berdasarkan Tim KPCPEN (2021c), peningkatan kasus pertama yang terjadi di hampir seluruh negara disebabkan oleh minimnya pemahaman terkait penyakit, besarnya mobilitas, belum ditemukan obat hingga vaksinasi yang dapat mendukung upaya pengobatan dan pencegahan pada masa itu.

Berdasarkan Tim KPCPEN (2021c), gelombang kedua terjadi dikarenakan kemunculan berbagai varian virus corona seperti Alfa, Beta, Gamma hingga Delta di berbagai wilayah yang disertai adanya mobilitas masyarakat. Selama periode gelombang kedua juga ditemukan masyarakat yang belum melakukan vaksinasi (BPS, 2021). Kenaikan kasus konfirmasi juga dapat dipengaruhi oleh adanya kenaikan angka *positivity rate* dalam seminggu terakhir sebesar 3,65% seiring dengan kenaikan kasus konfirmasi namun sejalan juga dengan pelaksanaan *testing* dan *tracing* (Rokom, 2022).

Selain itu, adanya varian baru COVID-19 turut memengaruhi perkembangan kasus konfirmasi terutama pada gelombang tiga ini yaitu Omicron. Per 16 Desember 2021, dilaporkan untuk pertama kali kasus varian Omicron terdeteksi pada salah satu orang yang bertugas bagian kebersihan di RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Namun setelah ditelusuri lebih lanjut, kasus

pertama diduga bermula akibat adanya riwayat perjalanan oleh warga negara Indonesia ke Nigeria pada tanggal 27 November 2021 (Rokom, 2021c). Sekitar 90% penularan lokal varian Omicron didominasi pada Provinsi DKI Jakarta (KOMINFO, 2022).

Keketatan Respons Kebijakan Pemerintah terhadap COVID-19

Awal dilaporkannya kasus COVID-19, keketatan kebijakan pemerintah di Indonesia mengalami peningkatan. Berbagai upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah seperti pelaksanaan pembelajaran daring dari rumah yaitu SE No. 4 Tahun 2020 yang dikeluarkan per 24 Maret 2020 (MENDIKBUD RI, 2020). Peliburan tempat kerja, pembatalan acara publik seperti pembatasan aktivitas di tempat atau fasilitas umum hingga aktivitas keagamaan yang termuat dalam PSBB (PP Republik Indonesia, 2020) merupakan suatu bentuk pembatasan gerakan internal. Selain tercantum dalam Permenhub No. PM 18 Tahun 2020, pembatasan transportasi atau angkutan umum untuk kegiatan mudik juga diterapkan pada periode ini oleh negara Indonesia pada Permenhub No. PM 25 Tahun 2020 (MENHUB RI, 2020a; MENHUB RI, 2020b).

Periode enam bulan awal tahun 2020 merupakan periode dunia menghadapi situasi yang kompleks, salah satunya pada sektor ekonomi. Guna mengatasi hal tersebut maka dikeluarkannya adaptasi kebiasaan baru (AKB). Periode tersebut, pemerintah menerbitkan KMK RI No. HK.01.07/MENKES/328/2020 (MENKES RI, 2020). Pelaksanaan kampanye informasi kesehatan juga telah dilaksanakan seperti yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang pada Maret – Desember 2020 yaitu kampanye GEMA (Gerakan Bersama) Melawan COVID-19 dengan menerapkan pendisiplinan 3M (Armani, Nursanti dan Ramdhani, 2021). Statistik index kebijakan mengalami penurunan yang

signifikan pada bulan Oktober 2020. Salah satu contoh kebijakan dalam membatasi gerakan internal yaitu PSBB. Menurut Permatasari (2021), perlambatan kenaikan kasus COVID-19 menyebabkan perubahan penerapan kebijakan dari PSBB yang ketat menjadi PSBB transisi, salah satunya dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta.

Index kebijakan periode bulan Maret – September 2021 menunjukkan grafik yang stabil. Periode tersebut merupakan periode dimana pembatasan kegiatan darurat diberlakukan sebagai salah satu pembatasan gerakan internal serta PPKM. Masyarakat di Jawa dan Bali telah diterapkan pembatasan kegiatan darurat kemudian salah satu bentuk pembatasan gerakan internal juga terdapat instruksi menteri dalam negeri yang membahas PPKM empat level serta pemberlakuan SE No. 12 Tahun 2021 yang membahas mengenai ketentuan perjalanan dalam negeri. Panduan selama ibadah telah dikeluarkan dan diatur dalam SE No. SE. 03 Tahun 2021 serta kebijakan upaya pembatasan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadat (Permatasari, 2021; KASATGAS, 2021a; KEMENAG RI, 2021a; dan KEMENAG, 2021b). Pembatalan aktivitas mudik selama hari raya idul fitri yang diakses pada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 (2021) juga telah dibahas dalam *Addendum* SE No. 13 Tahun 2021. Kemudian terdapat kampanye pemberian informasi oleh kementerian agama mengenai protokol kesehatan 5M melalui penyuluh agama dan tokoh agama serta edukasi kesehatan terhadap COVID-19 yang salah satunya dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang pada 2 September 2021 (Kontributor, 2021; Elfriana, 2021). Selain itu, telah dikeluarkannya kebijakan yang mengontrol perjalanan internasional salah satunya diatur pada Keputusan Ketua Satgas COVID-19 No. 12/2021 (KASATGAS, 2021b). Per tanggal 21 Desember 2021 telah dikeluarkannya surat keputusan bersama oleh beberapa menteri. Surat tersebut membahas mengenai proses

pembelajaran dengan ketentuan tertentu di masa pandemi (KEMENDIKBUD RI, 2021).

Hubungan antara Kasus Baru Konfirmasi COVID-19 dengan Keketatan Respons Kebijakan Pemerintah terhadap COVID-19

Penelitian Yanuarita dan Haryati (2021) menyebutkan secara umum penyebaran kasus COVID-19 salah satunya kasus konfirmasi positif di Kota Malang mengalami peningkatan setiap bulan. Oleh karena itu, sebagai upaya mengatasi kasus yang terus meningkat maka pemerintah Indonesia hingga pemerintah setempat daerah Kota Malang telah melakukan pembatasan akses keluar-masuk kota dengan menerapkan PSBB, melakukan penutupan sementara sekolah, kampus, kantor, tempat makan hingga tempat peribadatan.

Kemudian, upaya untuk membatasi gerakan internal terhadap kasus COVID-19 dapat dilakukan dengan menjaga jarak. Menjaga jarak fisik dapat menahan virus saat 20% penularan berasal dari seseorang yang tidak dikenal namun terinfeksi (Akande dan Akande, 2020). Penelitian Firdaus dan Wijayanto (2020) juga membuktikan bahwa penerapan *social distancing* dan PSBB dapat menurunkan mobilitas masyarakat serta mencegah penambahan kasus COVID-19 di Jakarta. Berdasarkan penelitian Rif'ati (2021) antara mobilitas ke tempat kerja dan tempat tinggal dengan kasus konfirmasi berdasarkan hasil uji korelasi Pearson menunjukkan nilai koefisien -0,13 dan -0,44. Hal tersebut menggambarkan bahwa penerapan kebijakan *work from home* di perkantoran dan beraktivitas di rumah memiliki korelasi negatif dengan kasus konfirmasi COVID-19. Mengurangi pergerakan masyarakat terutama pada pusat keramaian dapat menekan angka penyebaran virus COVID-19 (Rif'ati, 2021). Berdasarkan penelitian di Nigeria oleh Ogundokun, dkk (2020) dengan menggunakan model regresi linier telah

menunjukkan bahwa riwayat perjalanan dan adanya kontak meningkatkan kemungkinan individu terinfeksi COVID-19 sebesar 85% dan 88%.

Berdasarkan nilai korelasi positif, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi keketatan respons kebijakan pemerintah sehingga berbanding lurus dengan tren kasus konfirmasi COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan KOMINFO (2021) terjadinya lonjakan kasus konfirmasi berhubungan dengan ketidakdisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan walaupun pemerintah telah menerapkan kebijakan yang jelas seperti PPKM. Hasil survei penyelenggaraan PSBB di Jawa Timur menyatakan bahwa aturan yang diterapkan cukup bagus dan detail namun dalam pelaksanaannya oleh masyarakat telah ditemukan masih banyak kegiatan aktif di tempat umum hingga kepatuhan dalam menggunakan masker serta *physical distancing* yang masih rendah (IKA Airlangga Komisariat FKM & Persakmi Jawa Timur, 2020).

Berhubungan dengan kebijakan pembatasan gerakan internal, hasil studi Azis, dkk (2021) menyatakan bahwa implementasi kebijakan PSBB dinilai kurang optimal karena didapati masih rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan sehingga selama bulan Juni telah menunjukkan kecenderungan rata-rata laporan kasus konfirmasi meningkat mencapai 1.500 kasus per hari sampai awal Juli 2020. Laporan *Google COVID-19 Community Mobility Report* memperlihatkan adanya kenaikan tren mobilitas di beberapa wilayah di Indonesia sejak 19 Mei 2021 – 30 Juni 2021. Kenaikan mobilitas tersebut berjalan seiring dengan pelaksanaan PPKM oleh pemerintah (KOMINFO, 2021). Berdasarkan BNPB (2020), semakin sering dilakukannya pemeriksaan maka kasus konfirmasi semakin bertambah. Selain itu, semakin rendah kasus konfirmasi maka sejalan dengan respons kebijakan pemerintah. Hal ini dapat dilihat bahwa

adanya pembatalan pemberlakuan PPKM level III secara serentak sehingga seluruh kegiatan menjadi lebih longgar pada Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru) dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh adanya laporan data harian dari kasus konfirmasi secara nasional periode dua minggu terakhir yang menunjukkan penurunan kasus dengan rata-rata 100 – 300 kasus COVID-19 per hari di Indonesia (KEMENKO PMK, 2021).

KESIMPULAN

Kasus baru konfirmasi COVID-19 menunjukkan bahwa kondisi COVID-19 di Indonesia masih mengalami perubahan yang dinamis dan telah mengalami tiga kali gelombang pandemi COVID-19 sejak 2 Maret 2020 – 28 Februari 2022. Kemudian penilaian keketatan kebijakan pemerintah terhadap COVID-19 di Indonesia masih menunjukkan nilai respons yang dinamis namun pada tahun 2021 hingga 28 Februari 2022 cenderung menunjukkan penilaian yang statis. Hasil uji memperlihatkan adanya hubungan yang lemah antara keketatan respons kebijakan pemerintah dengan kasus baru konfirmasi COVID-19 di Indonesia dengan arah korelasi positif.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, orang tua, para dosen serta siapa saja yang turut membantu penyelesaian riset ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akande, O. W & Akande, T M. (2020). COVID-19 Pandemic: a Global Health Burden. *Nigerian Postgraduate Medical Journal*, 27(3), pp. 147–155. DOI: 10.4103/npmj.npmj_157_20. <https://www.npmj.org/text.asp?2020/27/3/147/289906>.

- Armani, R. E., Nursanti, S. & Ramdhani, M. (2021). Kampanye GEMA (Gerakan Bersama) Melawan COVID-19 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, *Metacommunication: Journal of Communication Studies*, 6(1), pp.9 – 20. DOI: <http://dx.doi.org/10.20527/mc.v6i1.10108>.
- Azis, M. A., dkk. (2021). Strategi dalam Penanganan Penyebaran COVID-19 melalui Kebijakan PSBB, *Jurnal Litbang Polri*, 24(2), pp.44 – 63.
- BNPB. 2020. *Ahli Epidemiologi: Angka Kasus COVID-19 Melonjak Bukan Berarti Keadaan Semakin Buruk*. Diakses online <https://bnpb.go.id/berita/ahli-epidemiologi-angka-kasus-covid19-melonjak-bukan-berarti-keadaan-semakin-buruk>.
- BPS. (2021). *Perilaku Masyarakat pada Masa PPKM Darurat: Periode 13 – 20 Juli 2021*. Jakarta: BPS RI.
- BSG University of Oxford. (2021). *Government Response Tracker*. Diakses online pada <https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/covid-19-government-response-tracker>.
- Elfriana. (2021). *Kampanye Edukasi Kesehatan dalam Adaptasi Kebiasaan Baru dan Vaksinasi COVID-19 di Pasar Lemabang*. <https://dinkes.palembang.go.id/?nmodul=berita&bhsnyo=id&bid=1425>.
- Firdaus, Z. F. & Wijayanto, A. W. (2020). Tinjauan Big Data Mobilitas Penduduk pada Masa Social Distancing dan New Normal serta Keterkaitannya dengan Jumlah Kasus COVID-19: Studi Kasus di Provinsi DKI Jakarta. In *Seminar Nasional Official Statistics*, 2020(1): 265 – 272. DOI: <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020il.502>.
- IKA Airlangga Komisariat FKM & Persakmi Jawa Timur. (2020). *Policy Brief: Perlu Penegakan Disiplin yang Intensif*. DOI: 10.13140/RG.2.2.14805.45289.
- JHU CSSE COVID-19 Data. (2022). *COVID-19 Dashboard*. <https://coronavirus.jhu.edu/map.html>.
- KASATGAS. (2021a). *Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*. Indonesia.
- KASATGAS. (2021b). *Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pintu Masuk (Entry Point), Tempat Karantina dan Kewajiban RT-PCR bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Internasional Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19*. Indonesia.
- KEMENAG RI. (2021a). *Surat Edaran Nomor SE. 03 Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/2021*. Indonesia.
- KEMENAG. (2021b). *Surat Edaran Nomor SE. 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadat*. Indonesia.
- KEMENDIKBUD RI. (2021). *Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- KEMENKO PMK. (2021). *Ini Alasan Pemerintah Terapkan Pelonggaran di Masa Libur Nataru*. <https://www.kemenkopmk.go.id/ini-alasan-pemerintah-terapkan-pelonggaran-di-masa-libur-nataru>.
- Kemlu. (2020). *Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Terkait Wabah COVID-19*. <https://kemlu.go.id/brussels/id/news/6349/kebijakan-pemerintah->

- republik-indonesia-terkait-wabah-covid-19.
- KOMINFO. (2021). *Memantau Mobilitas dan Kualitas Informasi di Tengah Pandemi*.
<https://www.kominfo.go.id/content/detail/35573/memantau-mobilitas-dan-kualitas-informasi-di-tengah-pandemi/0/artikel>.
- KOMINFO. (2022). *Puncak Omicron Diprediksi Februari – Maret, Menkes: Tetap Waspada dan Jangan Panik*.
<https://www.kominfo.go.id/content/detail/39405/puncak-omicron-diprediksi-februari-maret-menkes-tetap-waspada-dan-jangan-panik/0/berita>.
- Kontributor. (2021). *Kampanye 5M, Menag Siap Kerahkan Penyuluh dan Libatkan Tokoh Agama*.
<https://kemenag.go.id/read/kampanye-e-5m-menag-siap-kerahkan-penyuluh-dan-libatkan-tokoh-agama-8npxm>.
- MENDIKBUD RI. (2020). Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19). Jakarta.
- MENHUB RI. (2020a). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*. Indonesia.
- MENHUB RI. (2020b). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*. Indonesia.
- MENKES RI. (2020). *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi*. Indonesia.
- Menteri Dalam Negeri. (2021). *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*. Indonesia.
- Ogundokun, R. O., Lukman, A. F., Kibria, G. B. M., Awotunde, J. B & Aladeitan, B. B. (2020). Predictive modelling of COVID-19 confirmed cases in Nigeria, *Infect Dis Model*, 5: 543–548.
DOI 10.1016/j.idm.2020.08.003.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7428444/>.
- PP Republik Indonesia. (2020). PP Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Jakarta.
- Permatasari, D. (2021). *Kebijakan COVID-19 dari PSBB hingga PPKM Empat Level*.
<https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kebijakan-covid-19-dari-psbb-hingga-ppkm-empat-level>.
- Rif'ati, R. (2021). Hubungan Perubahan Mobilitas Penduduk selama Masa Pandemi dan Jumlah Kasus Terkonfirmasi COVID-19 di Provinsi Jambi, *Media Edukasi Data Ilmiah dan Analisis (MEDIAN)*, 4(1), pp.31 – 40.
- Rokom. (2021a). *Interaksi Sosial yang Tinggi Penyebab Lonjakan Kasus COVID-19*.
<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20210614/0137899/intera>

- ksi-sosial-yang-tinggi-penyebab-lonjakan-kasus-covid-19/.
- Rokom. (2021b). *Virus Corona Varian Baru B.117, b.1351, B.1617 Sudah Ada di Indonesia*. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20210504/1737688/virus-corona-varian-baru-b-117-b-1351-b-1617-sudah-ada-di-Indonesia>.
- Rokom. (2021c). *Kasus Pertama Omicron di Indonesia Diduga dari WNI yang Datang dari Nigeria*. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20211219/5339013/kasus-pertama-omicron-di-indonesia-diduga-dari-wni-yang-datang-dari-nigeria/#:~:text=Kementerian%20Kesehatan%20telah%20melakukan%20pelacakan,pada%20tanggal%2027%20November%202021>.
- Rokom. (2022). *Lonjakan Kasus COVID di Indonesia, Disebabkan Peningkatan Testing dan Tracing*. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20220131/0639241/lonjakan-kasus-covid-di-indonesia-disebabkan-peningkatan-testing-dan-tracing/>.
- Satuan Tugas Penanganan COVID-19. (2021). *Addendum Surat Edaran No. 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) selama Bulan Suci Ramdhan 1442 Hijriah*. Indonesia.
- Telles, C. R., Roy, A., Ajmal, M. R., Mustafa, S. K., Ahmad, M. A., de la Serna, J. M., Frigo, E. P., & Rosales, M. H. (2021). The Impact of COVID-19 Management Policies Tailored to Airborne SARS-CoV-2 Transmission: Policy Analysis, *JMIR public health and surveillance*, 7(4), e20699. <https://doi.org/10.2196/20699>.
- Tim KPCPEN. (2021c). *Satgas: Penting Memahami Faktor Penyebab Lonjakan agar Terhindar Gelombang Baru COVID-19*. <https://covid19.go.id/p/berita/satgas-penting-memahami-faktor-penyebab-lonjakan-agar-terhindar-gelombang-baru-covid-19>.
- Vermonte, P. & Wicaksono, T. Y. (2020). *Karakteristik dan Persebaran COVID-19 di Indonesia: Temuan Awal, CSIS Commentaries DMRU-043-ID*. Halaman 1 – 12.
- WHO. (2021). *Classification of Omicron (B.1.1.529): SARS-CoV-2 Variant of Concern*. [https://www.who.int/news/item/26-11-2021-classification-of-omicron-\(b.1.1.529\)-sars-cov-2-variant-of-concern](https://www.who.int/news/item/26-11-2021-classification-of-omicron-(b.1.1.529)-sars-cov-2-variant-of-concern).
- Yanuarita, H. A. & Haryati, S. (2021). Pengaruh COVID-19 terhadap Kondisi Sosial Budaya di Kota Malang dan Konsep Strategis dalam Penanganannya, *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, 2 (2): pp.58 – 71.